

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting adalah permasalahan dalam kesehatan yang merebak diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini memprihatinkan, mengingat pernyataan *UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)* memberi pernyataan bahwa 1 dari 3 anak didunia mengalami stunting. Diperkirakan terdapat lebih kurang 40% anak diperdesaan menginap stunting. Berbagai upaya terus digencarkan UNICEF sebagai organisasi PBB yang bergerak membantu kehidupan anak dan ibu di Negara-negara berkembang bergerak cepat untuk menanggulangi masalah tersebut.

Bentuk dukungan ini secara aktif dilakukan pada program-program seperti Gerakan Sadar Gizi Nasional (Scaling Up Nutrition-SUN)), yaitu program yang berfungsi untuk mencapai lingkungan nasional yang kondusif dan berkelanjutan, program ini juga melakukan upaya pencegahan *stunting*. Program ini adalah sebuah gerakan global yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan memastikan akses semua orang terhadap makanan dan yang diperlukan untuk hidup sehat. Didirikan pada tahun 2010, gerakan ini menggabungkan pemerintah, masyarakat sipil, PNN, swasta dan peneliti untuk bekerja bersama dalam menangani masalah nuttrisi yang ada di berbagai Negara. Tujuan dan fokus utama SUN :

- Mengurangi malnutrisi, meningkatkan status gizi dan mengirangi tingkat malnutrisi, terutama pada ibu hamil, bayi dan anak-anak. Fokus

utama periode 1.000 hari pertama kehidupan yang sangat krusial bagi perkembangan anak.

- Pendekatan Multisektoral, mengintegrasikan berbagai sektor seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, perlindungan sosial, dan air, sanitasi dan kebersihan untuk menciptakan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam meningkatkan gizi.
- Kepemimpinan Nasional, mendorong Negara-negara untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan program gizi yang efektif.
- Kemitraan dan Kolaborasi, memfasilitasi kemitraan antara pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan bekerja sama mencapai tujuan gizi.

Adapun strategi dan pendekatan yang digunakan :

- Advokasi dan Kesadaran, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi yang baik dan mengadvokasi kebijakan serta program yang mendukung peningkatan gizi.
- Mobilisasi sumberdaya, mengumpulkan dana dan sumber daya untuk mendukung program gizi di Negara-negara yang membutuhkan
- Monitoring dan Evaluasi, menggunakan data dan bukti untuk memantau kemajuan, mengevaluasi dampak, dan menginformasikan kebijakan serta praktik terbaik.

- Inovasi dan pengetahuan. Berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan inovasi dalam gizi untuk meningkatkan efektivitas program di lapangan.

Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, *Scaling Up Nutrition* berupaya memfasilitasi bahwa setiap individu terutama yang paling rentan, mendapatkan gizi yang cukup untuk berkembang secara optimal dan mencapai potensial penuh mereka.

Stunting adalah sebuah kondisi yang menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dari rekan sebayanya. *Short Statue (Stunt)/Stunting* atau kondisi tinggi atau panjang badan terhadap usia yang rendah digunakan dalam indikator malnutrisi kronis yang menjelaskan riwayat kurangnya asupan gizi balita dalam jangka lama (Rahayu et al., 2018). Stunting juga dikenal dengan istilah Retardasi Pertumbuhan Linier (RPL) yaitu kondisi awal pertumbuhan manusia pada 2-3 tahun pertumbuhan yang terjadi akibat asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh dan terserap yang kurang dan mengakibatkan infeksi atau kerusakan terhadap tinggi badan manusia yang berakhir pada ketidaksesuaian antara umur dan tinggi badan (Sudiman, 2018). Kondisi stunting disebabkan atas 2 faktor yakni faktor pada penyakit dan faktor asupan gizi (Rahayu et al., 2018). Aryastami dalam (Ketut Aryastami & Tarigan, 2017) masalah stunting akan berdampak sangat serius seperti dalam jangka pendek akan mempengaruhi moralitas dan morbiditas pada balita, dalam jangka menengah akan mempengaruhi kemampuan kognitif dan kecerdasan dan pada jangka akan menyebabkan penurunan kualitas sumber

daya manusia yang terjangkit stunting serta penyakit degenerative pada umur dewasa.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan stunting, stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan anak yang disebabkan oleh kombinasi kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang (Lestari, 2023). Gangguan pada pertumbuhan ini memiliki jangka waktu yang variatif, dapat terjadi dalam jangka yang cepat dan pada jangka yang panjang. Stunting menyebabkan gangguan pertumbuhan kerap terjadi pada penurunan berat badan yang disebabkan oleh turunnya nafsu makan pada anak yang menderita infeksi pencernaan atau diare. Sedangkan gangguan pertumbuhan pada jangka yang panjang dapat disebabkan pada hambatan tinggi badan pada anak. Urgensi stunting ini masuk kedalam tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah landasan dalam kerangka kerja dalam jangka 15 tahun yang bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dalam berkehidupan diseluruh dunia dalam segala aspek (Hadjarati et al., 2022). Konsep SDGs dimulai pada tahun 2015 dan akan berakhir pada tahun 2030. Konsep SDGs mencakup hal-hal yang lebih kompleks dan bersifat berkelanjutan bagi kehidupan manusia.

Konsep yang diimplementasi oleh SDGs tidaklah sama dengan pendahulunya yaitu MDGs. PBB berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun Negara yang sejahtera, demokratis, dan adil dimana pembangunan dapat dinikmati oleh semua orang dan

hak-hak generasi mendatang dilindungi. Dengan fokus yang kuat pada mereka yang terasingkan dan rentan, PBB bertekad untuk memerangi diskriminasi, mengurangi ketidaksetaraan dan menangani akar penyebabnya. Komitmen kesetaraan menempatkan prioritas pada martabat manusia dan kemajuan komunitas yang paling rentan terlebih dahulu. Hal ini menjadi krusial dalam menghadapi dampak pandemic COVID-19 dan dalam upaya menuju pemulihan yang berkelanjutan, kuat dan inklusif .

PBB akan memperkuat kemitraannya dengan otoritas dan masyarakat regional serta lokal untuk mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan.(Majid, 2016). Upaya ini juga akan melibatkan asosiasi industri, lembaga pemikir, pengelola data, dan lembaga ilmiah dan teknologi untuk menawarkan solusi inovatif bagi pembangunan yang terintegrasi yang sangat penting dalam pencapaian tersebut. Didalam SDGs terdapat 17 tujuan yaitu :

1. Tanpa Kemiskinan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana pun. Hal ini termasuk mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, memastikan akses terhadap layanan dasar, dan membangun ketahanan bagi mereka yang rentan terhadap bencana ekonomi, sosial dan lingkungan
2. Tanpa Kelaparan. mengakhiri kelaparan mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan produktivitas pertanian, mendukung sistem produksi pangan yang tangguh, dan memfasilitasi akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi bagi semua orang.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera, memastikan kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan untuk semua orang di segala usia. Hal ini mencakup angka kematian ibu dan anak, memerangi penyakit menular dan tidak menular, serta memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang esensial.
4. Pendidikan Berkualitas, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Hal ini mencakup memastikan semua anak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata, dan berkualitas
5. Kesetaraan Gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Hal ini mencakup penghapusan semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memastikan partisipasi penuh mereka dalam semua aspek kehidupan.
6. Air Bersih dan Sanitasi yang Layak, menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua orang. Hal ini mencakup memastikan akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau serta sanitasi yang memadai.
7. Energi Bersih dan Terjangkau, memastikan akses terhadap energy yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dan modern untuk semua. Hal ini mencakup peningkatan penggunaan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energy di dunia.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerjaan yang layak untuk semua dengan meningkatkan produktivitas ekonomi, mengurangi pengangguran, dan memastikan kondisi kerja yang aman dan terjamin.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Berkurangnya Kesenjangan, membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi dengan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta memperbaiki infrastruktur yang ada.
10. Mengurangi Ketimpangan, Mengurangi ketimpangan dalam dan antar Negara dengan mengurangi kesenjangan pendapatan, memastikan kesempatan yang sama, dan menghapus diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis, atau status sosial lainnya.
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan , membangun kota dan komunitas yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan memastikan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, transportasi yang aman dan terjangkau, serta meningkatkan perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang partisipatif.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan mengurangi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali serta mendorong penggunaan sumber daya yang efisien.

13. Penanganan Perubahan Iklim, mengambil tindakan mendesak untuk energy dan perubahan iklim serta dampaknya dengan mengintegrasikan tindakan perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran akan perubahan iklim.
14. Ekonomi Kelautan, Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan lautan, laut dan sumberdaya laut untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi pencemaran laut, melindungi ekosistemnya, dan mengatur regulasi tentang penangkapan ikan dan hasil laut secara berkelanjutan.
15. Ekonomi Daratan, melindungi, merestorasi dan mendukung penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, serta menghentikan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan kerusakan terhadap keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, memperkuar sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat kerjasama internasional, meningkatkan

dukungan keuangan untuk Negara berkemabnag, dan meingkatkan akses terhadap teknologi dan inovasi.

Tujuan Keberlanjutan ini setiap poinnya saling berkaitan satu sama lain. Setiap poin yang terbentuk harus berkesinambungan dengan poin lain. Poin 1 dan lainnya tidak dapat dipisahkan, karena menyangkut hal-hal yang saling berkaitan. Seperti misalnya poin 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dan poin 17 yaitu Kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai kemitraan yang baik, maka perdamaian dan keadilan melalui kelembagaan yang tangguh harus dijalin. Begitu juga dengan poin 1,2 dan 3 yang ketiganya saling mengikat. Demi menciptakan masyarakat yang sehat, maka dunia harus menjadi hunian yang mampu mengatasi kelaparan dan kemiskinan.

Tujuan ke-3 mengenai kesehatan ini merupakan yang penting karena merupakan masalah dasar bagi Negara Negara berkembang di dunia. Kehidupan yang sehat untuk menunjang kesejahteraan. Kehidupan yang sehat segara singkat dapat diterjemahkan sebagai individu yang terhindar dari penyakit dan mendapatkan seluruh hak dasar manusia dibidang kesehatan terutama penyakit stunting yang menyebabkan banyak gangguan kesehatan. Gangguan pada pertumbuhan ini memiliki jangka waktu yang variatif, dapat terjadi dalam jangka yang cepat dan pada jangka yang panjang. Stunting menyebabkan gangguan pertumbuhan kerap terjadi pada penurunan berat badan yang disebabkan oleh turunnya nafsu makan pada anak yang menderita infeksi pencernaan atau diare. Sedangkan gangguan pertumbuhan pada jangka yang panjang dapat disebabkan pada hambatan tinggi badan pada anak.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022. Angka ini turun 2,8 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tren positif dari penurunan stunting di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada 2020 prevalensi stunting di Indonesia berada pada urutan ke 2 tertinggi di Asia Tenggara dengan 31,8%, selanjutnya di 2021 turun menjadi 24,4% dan ditahun 2022 menjadi 21,6%. Presiden Indonesia, Joko Widodo menyampaikan dalam Rapat Kerja Nasional BKKBN pada Januari 2023 menyampaikan harapannya tren positif ini harus terus dijaga dan di 2024 ditargetkan angka stunting di Indonesia mampu turun diangka 14%.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk mencapai target tersebut. Pada Bab 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, dijelaskan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yaitu :

1. Menurunkan angka dan prevalensi stunting di Indonesia.
2. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas persiapan bagi masyarakat untuk berkeluarga.
3. Penjaminan Pemenuhan Asupan Gizi.
4. Memperbaiki pola asuh bagi anak.
5. Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan.
6. Meningkatkan kualitas sanitasi dan air bagi masyarakat (Indonesian Government, 2021).

Selanjutnya di pasal 3 disebutkan sasaran dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Satriawan, 2018) yaitu :

1. Remaja.
2. Calon Pengantin.
3. Ibu Hamil.
4. Ibu Menyusui.
5. Anak Usia 0-59 bulan

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022, dengan data per provinsi sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Stunting Indonesia 2022

No	Nama Provinsi	Nilai / Persen (%)
1	Nusa Tenggara Timur	35,3
2	Sulawesi Barat	35
3	Papua	34,6
4	Nusa Tenggara Barat	32,7
5	Aceh	31,2
6	Papua Barat	30
7	Sulawesi Tengah	28,2
8	Kalimantan Barat	27,8
9	Sulawesi Tenggara	27,7
10	Sulawesi Selatan	27,2
11	Kalimantan Tengah	26,9
12	Maluku Utara	26,1
13	Maluku	26,1
14	Sumatera Barat	25,2
15	Kalimantan Selatan	24,6
16	Kalimantan Timur	23,9
17	Gorontalo	23,8

18	Kalimantan Utara	22,1
19	Sumatera Utara	21,1
20	Jawa Tengah	20,8
21	Sulawesi Utara	20,5
22	Jawa Barat	20,2
23	Banten	20
24	Bengkulu	19,8
25	Jawa Timur	19,2
26	Sumatera Selatan	18,6
27	Kep Bangka Belitung	18,5
28	Jambi	18
29	Riau	17
30	DI Yogyakarta	16,4
31	Kepulauan Riau	15,4
32	Lampung	15,2
33	DKI Jakarta	14,8
34	Bali	8

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, Januari 2023

Tabel data diatas menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki prevalensi paling tinggi dengan 35,3%, Sulawesi Barat 35% serta Papua 34,6%. Meninjau dari WHO yang menjelaskan bahwa angka darurat stunting berada pada batas 20%, hal ini menunjukkan buruknya ketercukupan nutrisi dan gizi pada Anak di Indonesia sebab sebanyak 23 Provinsi masih berada di prevalensi 20% keatas. Provinsi Bengkulu sendiri berada pada urutan 24 secara nasional dengan prevalensi 19,8% dan nomor 4 tertinggi di regional Sumatra. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat masih tingginya kasus kasu yang ada di Indonesia dan masih jauh dari target nasional yaitu 14%.

Ketercukupan nutrisi dan gizi pada anak dimulai dari 0 sampai 3 tahun merupakan hal yang sangat penting diperhatikan karena akan menjadi suatu

penentu pertumbuhan dan perkembangan bagi seorang anak mampu berfungsi secara maksimal sebagai generasi penerus bangsa. Asupan gizi yang maksimal pada anak adalah untuk menstimulus perkembangan fisik dan motorik supaya tumbuh dan berkembang secara maksimal (Rini, 1994). Mengingat pentingnya peningkatan kesehatan dari mulai sejak dini, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 yang memberikan panduan tentang penggunaan dana transfer kepada daerah dan dana desa untuk kegiatan intervensi pencegahan yang terintegrasi sebagai TKDD ini, diberdayakan untuk mendukung implementasi intervensi pencegahan yang terintegrasi, yang meliputi:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik, diperuntukan bidang kesehatan, bidang air minum
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik, diberikan dalam bentuk Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
3. Dana Desa.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 dan Nota Keuangannya pada Agustus 2022, Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan fiskal 2023 yang bertujuan untuk mendorong Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang berfokus pada :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang inovatif, produktif, serta mampu bersaing melalui sistem percepatan reformasi sistem perlindungan sosial dan peningkatan kualitas pendidikan.
2. Percepatan pembangunan dalam infrasturktur untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan terutama pembanguna

dibidang konektivitas, energi, pangan, teknologi, dan perbaikan telekomunikasi dan teknologi informasi.

3. Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi dan perampingan regulasi.
4. Implementasi revitalisasi industri dengan meningkatkan ekspor.
5. Meningkatkan pengembangan ekonomi hijau

Di tahun 2023, peningkatan kualitas SDM masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan Indonesia. Salah satu aspek yang dibangun untuk memperbaiki kualitas SDM adalah dengan memperbaiki kondisi gizi dan mencegah stunting. Pada tahun 2022, alokasi dana dalam pencegahan dan penanganan stunting sebesar 44,8 triliun rupiah. Anggaran ini di gelontorkan lewat Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar 8,9 triliun rupiah, serta DAK Nonfisik sebesar 1,8 triliun rupiah, dan dana dari belanja yang tersebar di 17 Kementrian dan Lembaga sebesar 34,1 triliun rupiah. Alokasi dana ini diupayakan untuk menunjang kesehatan masyarakat Indonesia mengingat banyak target yang harus dicapai diantaranya target Indonesia Emas 2045.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah visi jangka panjang yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengubah Indonesia menjadi Negara yang maju pada tahun 2045, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik, 2023). Visi ini bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia

Misi Indonesia Emas 2045 adalah menciptakan masyarakat yang makmur, bersaing secara global dan memiliki pengaruh yang signifikan di panggung

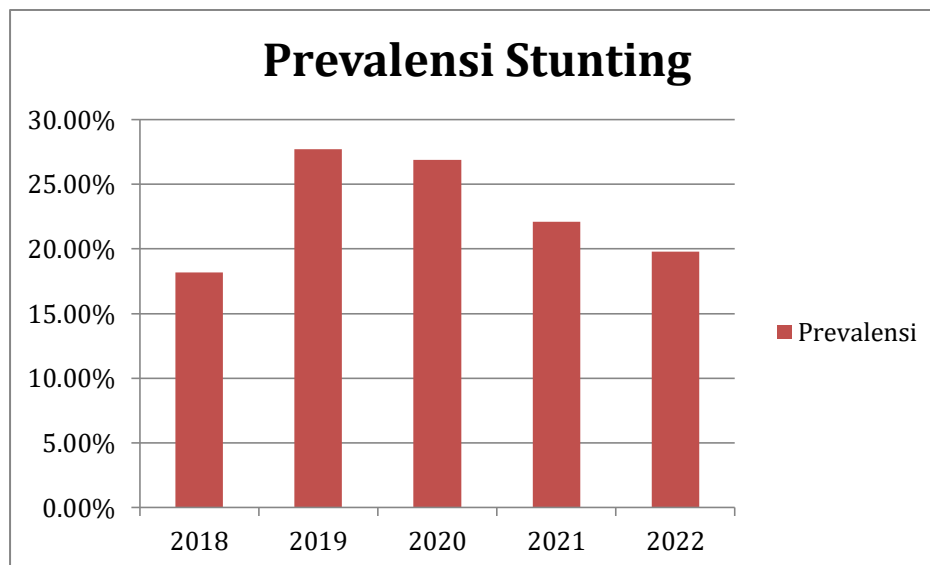
internasional. Visi mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan dan inovasi. Demi mewujudkan Indonesia Emas 2024, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan seluruh elemen masyarakat. Hal ini melibatkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan infrastruktur yang memadai, penguatan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Pencapaian Indonesia Emas 2024 menegaskan peran Indonesia sebagai Negara yang merdeka, mandiri dan aktif dalam memelihara perdamaian dan stabilitas di tingkat regional dan global. Hal ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Sehingga pemerintah sebagai otoritas Negara wajib mengupayakan program-program penunjang kesehatan lewat kebijakan-kebijakan yang akan diambil.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai percepatan stunting dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 yang mengatur panduan penggunaan dana transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan yang terintegrasi, maka setiap Provinsi memiliki peran dalam bersinergi mengupayakan penurunan stunting di Indonesia, hal ini juga dilakukan oleh Provinsi Bengkulu.

Provinsi Bengkulu merupakan Provinsi di Sumatra yang memiliki angka stunting yang sangat tinggi. Pada 2017, Bengkulu menempati ranking 4 di Sumatra dengan 21,50%, Pada data yang lebih baru di 2022 persentase turun menjadi

19,8% bertepatan pada rangking 4 di Sumatra dan 24 secara nasional. Dengan fakta tersebut menunjukkan bahwa keadaan dalam pencukupan gizi bagi anak di Bengkulu masih perlu perbaikan. Menindak lanjuti Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 46 Tahun 2019 tentang pencegahan Perkawinan anak, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menerbitkan Rencana Aksi Program Kesehatan 2020 yang mencakup tentang:

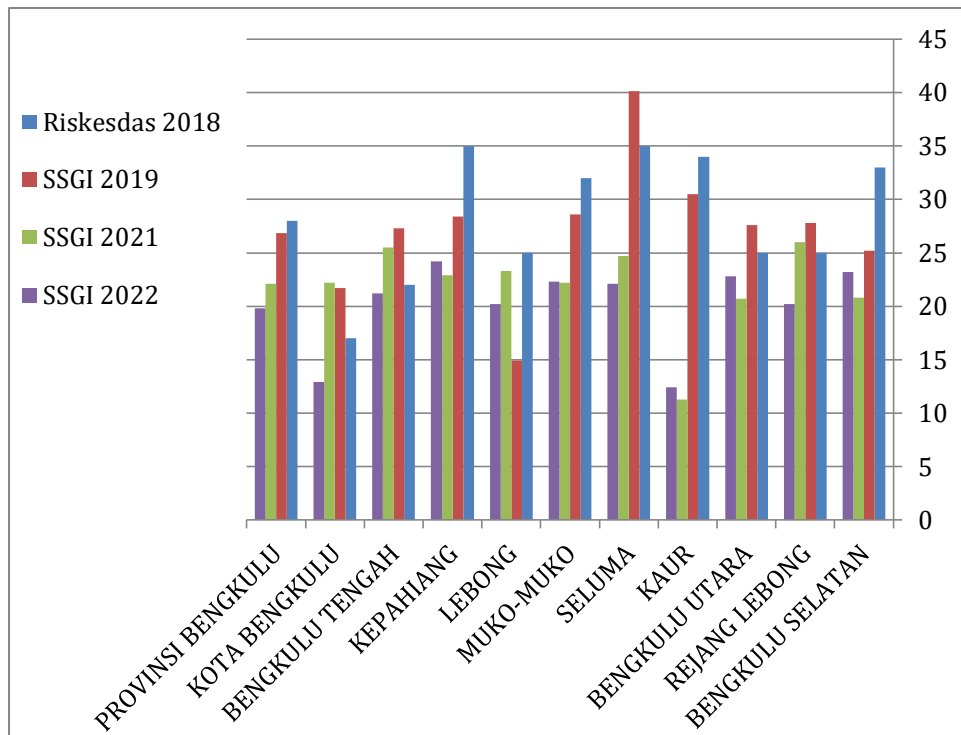
1. Peningkatan kesejahteraan ibu dan anak dan status gizi masyarakat.
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar serta rujukan.
3. Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian penyakit, dan manajemen situasi darurat.
4. Peningkatan aksesibilitas, kemandirian, dan mutu produk farmasi dan peralatan medis.
5. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi.
6. Jaminan pembiayaan kesehatan yang memadai.
7. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
8. Peningkatan efisiensi dan pengelolaan riset kesehatan dan sistem informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik

Diagram 1. 1 Data Stunting Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2022

Sumber : BPS,2023

Data yang tersaji pada grafik menunjukkan kondisi stunting di Provinsi Bengkulu berada pada kondisi yang naik turun. Dari tahun 2018 ke 2019 terdapat kenaikan prevalensi stunting dari 18,20% menjadi meningkat tajam ke 27,70%. Meski pada periode 2020-2022 tren yang terjadi merupakan penurunan. Meskipun demikian, pada tahun 2020-2021 prevalensi selalu berada pada angka diatas 20%. Jika merujuk pada pedoman WHO yang memberi ambang batas prevalensi stunting pada 20% (Rahmadhita, 2020). Di tahun 2022 prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu berada pada 19,80% yang menunjukkan penurunan yang sangat rendah dan masih mendekati zona darurat stunting menurut WHO.

Diagram 1. 2 Prevalensi Stunting Kabupaten Bengkulu Selatan 2018-2022



Sumber : sigiziterpadu.com, 2023

Data yang tersaji pada grafik diatas merupakan kondisi prevalensi stunting Provinsi Bengkulu yang dikelompokkan dalam kabupaten/kota. Dari data tersebut semua kabupaten/kota mengalami kondisi tren fluktuatif. Data tertinggi ada pada tahun 2019 di Kabupaten Seluma dengan prevalensi sebesar 40,1%, selanjutnya di tahun 2018 prevalensi sebesar 35% di Kabupaten Kepahiang. Data terbaru pada tahun 2022 menunjukkan penurunan pada beberapa kabupaten/kota seperti pada Kota Bengkulu yang berhasil menekan angka prevalensi stunting pada angka 12,9% yang pada tahun sebelumnya berada pada 22,2%. Sedangkan pada data 2022 angka stunting tertinggi berada di kabupaten Kepahiang 24,2%, Bengkulu Selatan dengan prevalensi 23,2%, disusul oleh Bengkulu Utara 22,8%. Beralih pada prevalensi terendah berada pada Kabupaten Kaur yang berhasil menekan

angka prevalensi pada 12,4% disusul Kota Bengkulu 12,9%. Data prevalensi pada 2020 menurut Provinsi dan Kabupaten tidak dapat dilakukan pengukuran antropometri akibat dari pandemic COVID-19 sehingga data 2020 yang tersaji pada grafik Provinsi bersifat prediksi dan tidak tersedia data nasional per kabupaten (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Ditinjau dari protokol WHO yang menyatakan tingkat darurat stunting berada pada ambang batas prevalensi sebesar 20%, maka terdapat 8 kabupaten/kota yang memiliki prevalensi diatas ambang batas yaitu :

Tabel 1. 2 Pengelompokan Kategori Stunting Per Kabupaten di Provinsi Bengkulu berdasarkan Protokol WHO

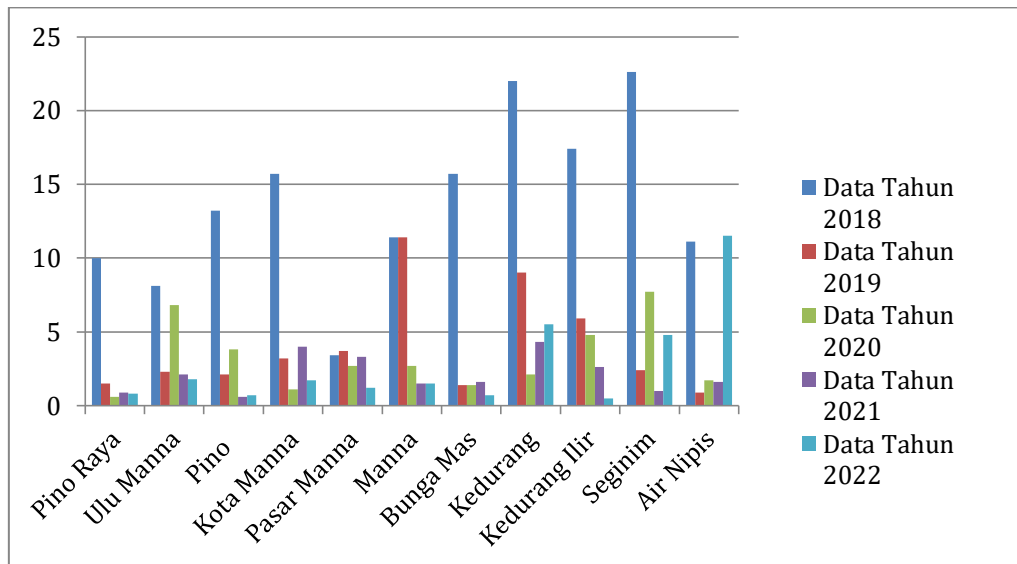
No	Kabupaten/Kota	Prevalensi (%)	Kategori
1.	Kepahiang	24,2	BURUK
2.	Bengkulu Selatan	23,2	BURUK
3.	Bengkulu Utara	22,8	BURUK
4.	Muko-Muko	22,3	BURUK
5.	Seluma	22,1	BURUK
6.	Bengkulu Tengah	22,1	BURUK
7.	Rejang Lebong	20,2	BURUK
8.	Lebong	20,2	BURUK
9.	Kota Bengkulu	12,9	BAIK
10.	Kaur	12,4	BAIK

sumber : sigiziterpadu.com

Meninjau lokus dari penelitian ini, Pemerintah Bengkulu Selatan telah meluncurkan sebuah produk hukum untuk mengatasi stunting melalui Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan menekan angka stunting di Kabupaten di Bengkulu Selatan. Peringkat Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada peringkat 2 prevalensi tertinggi di

Provinsi Bengkulu pada 2022. Melihat tren angka prevalensi pada Bengkulu Selatan, terlihat bahwa tren yang terjadi masih bersifat fluktuatif/*Horizontal Trend*, kondisi stunting di Provinsi Bengkulu stagan dari waktu ke waktu. Tren yang terjadi menunjukkan penurunan di satu waktu, kemudian naik lagi di waktu berikutnya. Penurunan prevalensi terjadi pada 2018-2021, dimana pada 2018 prevalensi sebesar 35% mampu ditekan pada 2019 sehingga turun menjadi 25,2% yang kemudian kembali turun pada 2021 pada angka 20,8%. Sayangnya, tren turunnya prevalensi ini mengalami kejadian yang berbalik dimana pada 2022 meningkat menjadi 23,2%. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian yang lebih karena Kabupaten Bengkulu Selatan gagal mempertahankan tren turunnya prevalensi dan tetap berada pada ambang batas/kondisi darurat stunting menurut WHO.

Diagram 1. 3 Prevalensi Stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022 menurut Kecamatan



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam data yang disajikan mengenai prevalensi stunting Bengkulu Selatan 2018-2022 menurut Kabupaten dapat dilihat bahwa tren prevalensi stunting menunjukkan tren yang bersifat naik turun (fluktuatif). Prevalensi stunting di Bengkulu Selatan kebanyakan berada di titik tertinggi pada 2018 dengan prevalensi tertinggi pada Kecamatan Seginim dengan 22,6%. Pada data terbaru 2022 sebenarnya tren dari Kecamatan di Bengkulu Selatan sudah membaik. Dibuktikan dengan beberapa kecamatan yang sudah bisa menekan angka bahkan sampai dibawah 10%. Kendati demikian masalah yang Pemerintah harus menciptakan konsistensi dalam penekanan angka stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan. Terlebih dengan adanya fakta bahwa dalam data terbaru 2022, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Kabupaten dengan prevalensi sebesar 23,2% yang menempatkan Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada peringkat 2

prevalensi tertinggi stunting di Provinsi Bengkulu. Hal ini juga cukup memprihatinkan mengingat target Provinsi Bengkulu dalam menekan stunting yang disampaikan dalam Rapat Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting pada Rakerda Program Bangga Kencana 2023, bahwa Provinsi Bengkulu menargetkan turunnya stunting Provinsi Bengkulu pada 12,55 di 2024 mendatang.

Dalam Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 800/15/TPPS KAB BS Tahun 2022, belum terdapat keterlibatan pihak swasta didalamnya. Keterlibatan sektor swasta dalam berbagai inisiatif pemerintah sangat signifikan dampaknya, karena swasta memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dan dampak sosial yang positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Program program ini dibuat sesuai dengan target Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menargetkan turunnya prevalensi pada angka 14% di Tahun 2024. Secara keseluruhan, pelaksanaan program secara keseluruhan sudah baik. Kendati demikian, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pada program monitoring dan evaluasi asi eksklusif. Pada laporan tahunan rekapitulasi bayi umur sampai dengan 6 bulan yang mendapat asi eksklusif hanya mencapai 81,07%. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberian asi eksklusif belum optimal. Dari sebaran aktor yang terlibat, pemerintah sangat mendominasi dalam kolaborasi pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan dan belum ditemui keterlibatan aktif dari pihak swasta dalam proses kolaborasi. Berdasarkan pemaparan diatas maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam skripsi ini adalah Bagaimana keterlibatan *stakeholders* dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

- 1) Prevalensi stunting Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada angka 23,2%, prevalensi ini belum mencapai target yaitu 14%.
- 2) Trend stunting di Bengkulu Selatan yang memburuk.
- 3) Belum adanya keterlibatan *stakeholders* lain dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang sebelumnya maka, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Siapa *stakeholders* yang terlibat dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan?.
- 2) Bagaimana peran masing masing *stakeholders* dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan?.
- 3) Apa faktor pendorong dan penghambat keterlibatan *stakeholders* dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Mengidentifikasi *stakeholders* dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2) Menganalisis peran masing masing *stakeholders* dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 3) Menganalisis faktor pendorong dan penghambat keterlibatan *stakeholders* dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Manfaat suatu penelitian menjadi tolok ukur tujuan dari penelitian tersebut. Dengan melihat latar belakang, rumusan masalah, hingga tujuan, diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak, yaitu :

1. Bagi Peneliti.

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang administrasi publik. Selain itu, memperdalam pemahaman tentang metode dan teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat dibandingkan dengan peneliti lain.

2. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai sumber informasi kepada masyarakat mengenai *stakeholders* mapping dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Bagi Pemerintah.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam menyaring laporan pengaduan masyarakat dengan lebih efektif. Selain itu, dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam peran pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dikaji berfokus pada *stakeholders mapping*, dan peran *stakeholders*.

Agus dkk dalam artikelnya membahas tentang pemetaan *stakeholders* dalam manajemen pemilu. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilu telah menerapkan konsep pemerintahan kolaboratif. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraan pemilu tidak menempatkan semuanya aktor kolaboratif dalam pengambilan keputusan. Khusus untuk tahap pengambilan keputusan, inilah fungsi dari penyelenggara pemilu, sedangkan aktor lainnya (masyarakat, swasta, perguruan tinggi) berfungsi sebagai sistem pendukung dalam penyelenggaraan pemilu (Agus, 2023).

Penelitian kedua dilakukan oleh Sherly Dwi Fedora dan Risca Fleureta Hudiyo untuk mengevaluasi sistem pemetaan pemangku kepentingan PT Semen Padang, terutama terkait dengan kegiatan pemberian dukungan dana sponsorship. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, analisis menggunakan model *BSR*. Berdasarkan analisis pemetaan dan pengelompokan *stakeholders* perusahaan, ditemukan bahwa 17 *stakeholders* dianggap sangat penting, 30 *stakeholders* penting, 28 *stakeholders* cukup penting, dan 21 *stakeholders* dianggap kurang penting. (Fedora, 2019).

Berbeda dengan penelitian diatas. Rachmawati Eva dan Muhammad Redito melakukan studi tentang pemangku kepentingan yang terlibat pada Curug

Bibijilan dan potensi keterlibatan *stakeholders* yang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan wawancara, lapangan observasi, dan studi literatur. Berdasarkan studi tersebut didapatkan hasil *Stakeholders* premier: Perhutani, Kompepar, BAT *Stakeholder* sekunder: Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan Dinas, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral *Stakeholders* kunci : Desa Kertaangsana, Perhutani. Sedangkan *stakeholders* yang memiliki potensi untuk terlibat adalah pihak swasta sebagai pemodal dan perguruan tinggi sebagai tim riset untuk kepentingan pariwisata (Rachmawati & Anjana, 2021).

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Elvis Salouw dengan 4 tujuan yaitu pengembangan Pengelolaan Pariwisata Kepulauan Banda, 2) mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berpartisipasi, mengetahui peran masing-masing pemangku kepentingan dan mendeskripsikan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Pariwisata Kepulauan Banda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan FGD, observasi dan wawancara digunakan untuk mencari data primer. Hasilnya menunjukkan Koordinasi antar pemangku kepentingan belum berjalan dengan baik sehingga peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata belum menunjukkan hasil yang maksimal, Peran swasta juga memiliki kekurangan sehingga pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh sektor publik belum berjalan dengan baik (Salouw, 2021).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zamzam Masrurun dan Diah Meutiah dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan hubungan

antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kawasan pariwisata strategis di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi pustaka. Hasilnya ditemukan 3 stakehoders yaitu *stakeholders* kunci, primer dan sekunder. Peran swasta juga memiliki kekurangan sehingga pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh sektor publik belum berjalan dengan baik (Masrurun & Nastiti, 2023).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Riska Destiana dkk yang mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat, menganalisis peran pemangku kepentingan, menganalisis hubungan antar pemangku kepentingan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang memadukan wawancara online, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata halal pulau ini melibatkan pemangku kepentingan dengan konsep pentahelix yang terdiri dari akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media massa. Peran pemangku kepentingan tercermin dalam peran pencipta kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana dan akselerator. Hubungan antar pemangku kepentingan dilihat dari bentuk dan kegiatannya. Nilai dan komunikasi menjadi faktor pendukung pengembangan destinasi wisata halal, sedangkan kepercayaan dan kebijakan menjadi faktor penghambat (Destiana et al., 2020).

Sejalan dengan penilitian diatas, penelitian yang dilakukan Masyurah dkk melalui mtode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis peran serta apa saja

faktor penghambat yang mempengaruhi *stakeholders*, Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan sebagai pencipta kebijakan, pelaksana, coordinator, fasilitator dan akselerator. Sedangkan OPD, Rumah Duta Revolusi Mental, rumah sakit, akademisi dan Bhabinkamtibmas berperan sebagai fasilitator dan akselerator, dalam perlindungan anak dan reintegrasi sosial, Faktor penghambat yang ditemukan adalah budaya masyarakat. Peran swasta juga memiliki kekurangan sehingga pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh sektor publik belum berjalan dengan baik (Masyhura et al., 2021)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sadikin dkk dengan mengidentifikasi *stakeholders* dalam pengelolaan wisata Desa Randugede. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis *stakeholders* menjadi primer, sekunder dan kunci. *Stakeholders* utama meliputi warga, pengelola desa wisata seperti Randualas yang merupakan sub unit Bumdes Randugede, investor dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan. Sedangkan sekunder terdiri dari Pemerintah Desa Randugede, komunitas swasta, agen perjalanan wisata dan media massa. (Sadikin et al., 2021).

Sejalan dengan penelitian diatas Dewi melakukan penelitian untuk mengenali dan menetapkan pemangku kepentingan serta menilai dampak dan relevansinya dalam upaya pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengelompokan *stakeholders* menjadi primer, sekunder dan kunci. Berdasarkan

hasil penelitian maka didapati *Stakeholders* utama mencakup penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dari 10 Kecamatan dan kelompok tani terkair. *Stakeholders* kunci melibatkan UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah. Sedangkan *stakeholders* tambahan meliputi pihak eksternal (Dewi, 2020).

Penelitian terakhir yang menjadi literature review adalah penelitian yang dilakukan Erni Febrianti dan Dewi Eprilianto untuk mengetahui peran *stakeholders* dalam pengembangan city branding “Lamongan Megilan”. Metode penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Policy Creator : Diskominfo Kabupaten Lamongan Fasilitator : Diskominfo dan Disparbud Kabupaten Lamongan Implementor: Diskominfo, Disparbud, Unisla, masyarakat (komunitas pokdarwis), media dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akselerator: Diskominfo dan Disparbud (Erni,2023).

Kebaharuan penelitian ini dibandingkan dengan literature review diatas adalah perbedaan pada program yang dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan *stakeholders* dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang berbeda dengan literature review yang meneliti pemetaan *stakeholders* mengenai pengembangan pariwisata. Penelitian ini juga meneliti mengenai peran dari masing masing *stakeholders* yang terlibat serta faktor penghambat dan pendorong keterlibatan *stakeholders* dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis, Judul, Tahun dan Nama Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Agus : 2023	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan pemangku kepentingan sebagai model untuk penguatan peran dalam manajemen pemilihan umum.	Penelitian ini memakai pendekatan secara kualitatif.	The discovery indicates that election management has adopted the concept of collaborative governance. However, in the context of election management, collaborative governance does not involve all collaborative actors in decision-making processes. Instead, the election management body retains decision-making authority, while other actors serve in supportive roles within the election management framework.
2.	Fedora, ; Dwi, Shely. 2019	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sistem pemetaan pemangku kepentingan PT Semen Padang.	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, analisis menggunakan model BSR	Berdasarkan hasil pemetaan atau pengelompokan <i>stakeholder</i> perusahaan didapati 17 <i>stakeholders</i> sangat penting, 30 penting, dan 28 cukup penting serta 21 kurang penting.
3	Rachmawati, Eva. 2021	Studi ini menganalisis pemangku kepentingan saat ini dan potensial yang terlibat dalam pengembangan wisata petualangan di Curug Bibijilan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan wawancara, lapangan observasi, dan studi literatur.	<i>Stakeholders</i> premier: Perhutani, Kompepar, BAT <i>Stakeholder</i> sekunder: Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan Dinas, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral <i>Stakeholders</i> kunci : Desa Kertaangsana, Perhutani
4	Salouw, Elvis. 2021	Penelitian dilakukan untuk mengetahui : 1.Perkembangan pengeolaan pariwisata Pulau	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil menunjukkan : 1.Koordinasi pemangku kepentingan belum optimal 2. Peran sektor swasra minim.

		<p>Banda</p> <p>2.Mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat.</p> <p>3.Memahami perannya masing-masing</p> <p>4.Kolaborasi yang terjadi</p>		
5	Masrurun, Zamzam ; Meutia, Diah. 2023	<p>Tujuan penelitian ini untuk mengenali, mengelompokan dan menjelaskan interaksi antara pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan pariwisata strategis di Kabupaten Wonosobo.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan menerapkan pendekatan metode analisis <i>stakeholders</i>.</p>	<p>Ada tiga pemangku kepentingan utama yang memiliki peran dan keterlibatan paling signifikan dalam Kawasan; dua kelompok pemangku kepentingan, di antaranya termasuk dalam kelompok subjek; lima pemangku kepentingan termasuk dalam kelompok penata konteks; dan delapan belas lainnya merupakan kelompok pengamat.</p>
6	Destiana, Riska ; Kismartini ; Yuniningsih, Tri. 2020	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat, menganalisis peran pemangku kepentingan, menganalisis hubungan antar pemangku kepentingan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat.</p>	<p>Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang memadukan wawancara online, dokumentasi, dan observasi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata halal pulau ini melibatkan pemangku kepentingan dengan konsep pentahelix yang terdiri dari akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media massa. Peran pemangku kepentingan tercermin dalam peran pencipta kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana dan akselerator. Hubungan antar pemangku kepentingan dilihat dari bentuk dan kegiatannya. Nilai dan komunikasi menjadi faktor pendukung pengembangan destinasi wisata halal, sedangkan kepercayaan dan kebijakan</p>

				menjadi faktor penghambat.
7	Masyurah, ; Yuniningsih, Tri ; Hayu Dwimawanti, Ida. 2020	Penelitian ini menganalisa peran <i>stakeholder</i> dan mengetahui faktor penghambat peran <i>stakeholder</i> .	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas DP3A berperan sebagai pembuat kebijakan, pelaksana, coordinator, fasilitator dan pendorong, PT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos JPPP sebagai pelaksana, pendorong, fasilitator, dan coordinator. Faktor penghambat budaya masyarakat.
8	Brilianti, E. D., Wibowo, A., & Lestari, E. 2021	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wisata Desa Randugede.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	<i>Stakeholders</i> primer terdiri dari penduduk atau masyarakat desa, <i>stakeholder</i> kunci terdiri dari pengelola desa wisata yaitu sub unit BUMDES Randugede yang bernama Randualas, investor, dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, sedangkan <i>stakeholder</i> sekunder terdiri dari Pemerintah Desa Randugede, komunitas swasta, biro perjalanan pariwisata dan media massa.
9	Dewi, M. R., Nurfani, H. D., Aisyah Borneo, A. N., & Arung, R. 2020.	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan <i>stakeholder</i> berdasarkan pengaruh dan kepentingannya masing-masing dalam pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	<i>Stakeholders</i> primer meliputi Warga Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi 10 Kecamatan dengan potensi Agropolitan dan Kelompok Tani di 10 Kecamatan dengan potensi agropolitan. <i>Stakeholders</i> kunci meliputi UPT. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagai unsur perangkat daerah dan <i>Stakeholders</i> sekunder meliputi pihak eksternal.

10	Febrianti, Eni; Eprilianto, Deby. 2023.	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan city branding “Lamongan Megilan”.	Metode penelitian ini adalah deksriptif kualitatif.	Policy Creator : Diskominfo Kabupaten Lamongan Fasilitator : Diskominfo dan Disparbud Kabupaten Lamongan Implementor: Diskominfo, Disparbud, Unisla, masyarakat (komunitas pokdarwis), media dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akselerator: Diskominfo dan Disparbud
----	---	--	---	--

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan cabang ilmu sosial yang didalamnya dipelajari atas 3 unsur pokok tentang keberlangsungan kenegaraan dari lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif (Panjaitan & Pardede, 2021). Sederhananya, administrasi publik adalah ilmu Pelajari lebih lanjut tentang mengelola organisasi hadirin walaupun sama-sama mempelajari organisasi, Administrasi publik berbeda dari ilmu manajemen. Manajemen mempelajari manajemen organisasi swasta, kemudian administrasi publik menyelidiki organisasi tersebut Publik/Pemerintah seperti Departemen dan di departemen dari tingkat kabupaten ke atas tengah Penelitian ini melibatkan birokrasi; membuat sketsa, implementasi dan evaluasi kebijakan publik; manajemen pembangunan; administrasi daerah; dan bagus Administrasi.

Ilmu administrasi publik mengacu pada ilmu yang mempelajari kerjasama dalam lembaga atau organisasi yang bersifat publik. Administrasi publik berfokus pada 2 cabang yaitu kebijakan publik dan manajemen publik. Kebijakan publik

melibatkan perencanaan jangka panjang yang bertujuan untuk memajukan pembangunan negara dan masyarakat. Proses ini mencakup penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Paradigma berasal dari bahasa Yunani yang mengacu pada contoh yang sangat jelas atau khas atau arketipe. Berdasarkan definisi ini beberapa ahli kadang-kadang mengganti model dengan paradigma dan menggunakan kata paradigma untuk merujuk pada model. Sebagian ahli berpendapat perbedaan yang jelas antara keduanya. Pengembangan dari suatu teori konteks masalah yang spesifik, sementara teori berasal dari suatu paradigma (Nugroho, 2016).

Manajemen adalah usaha dan kegiatan yang sekitar manajemen asuransi Mencapai tujuan. Administrasi publik adalah debat ilmu sosial yang didalamnya dapat ditemukan tiga elemen penting kehidupan nasional meliputi lembaga dan urusan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Gagasan-gagasan yang muncul memperkuat paradigma politik administrative yang dikotomi seperti yang diungkap dalam karya-karya fenomenal lainnya dalam “Principles of Scientific Management tahun 1911 oleh Frederick W. Taylor seorang ahli manajemen ilmiah yang mengembangkan pendekatan baru dalam manajemen pabrik sektor swasta, yang dikenal sebagai Time and Motion Study. Metode ini mengemukakan bahwa ada cara optimal untuk menjalankan tugas tertentu. Konsep manajemen ilmiah bertujuan untuk meningkatkan output dengan metode produksi yang cepat, efisien dan minim energy. Jika terdapat cara terbaik untuk meningkatkan

produktivitas di sektor industry, secara logis juga ada cara yang sama untuk organisasi publik. Wilson berpendapat bahwa pada dasarnya bidang administrasi adalah bisnis, sehingga metode yang sukses di dunia bisnsi dapat diterakpkan dalam sektor publik.

Pergeseran paradigma terjadi dari masa ke masa sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Asumsi pokok dari paradigma pertama memisahkan urusan politik dan fungsi administrative sebagai strategi untuk meningkatkan efeisiensi dan efektivitas.

Pada tahun 1937 paradigma kedua muncul dan mecapai puncak kontribus dari Luther H.Gulick dan Lyndall Urwick dalam tulisan mereka yang terkenal “Paper on The Science of Administration”, yang memperkenalkan konsep POSDCORD (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coodrdinating, Reporting, Budgeting*). Konsep ini adalah istilah yang merangkum tanggung jawab eksekutif terhadap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penempatan staf, koordinasi, pelaporan, dan penganggaranParadigma kedua membahas prinsip-prinsip administrasi yang dianggap dapat berlaku secara universal dalam berbagai jenis organisasi dan lingkunag budaya.

Paradigna ketiga, menggambarkan administrasi publik sebagai cabang ilmu politik. Setelah munculnya konsep POSDCORB, pada tahun 1938 Herbet Simon menerbitkan bukunya yang berjudul “Administrative Behavior”. Selain itu Fritz Morstein-Marx dalam karyanya “Element of Public Administrations” mengemukakan gagasan bahwa administrasi dan politik dapat dipisahkan. Marx menyadari bahwa konsep administrasi yang dianggap bebas nilai sebenarnya

memiliki keterkaitan yang erat dengan politik. Fase paradigma ketiga dikenal dengan teori-teori neoklasik dalam administrasi Negara. Simon pada tahun 1947 membahas tentang konsep Rasionalitas Murni (Pure Rationality) dan Rasionalitas Terbatas (Bounded Rationality) dalam proses pengambilan keputusan di organisasi. Selain itu pada paradigma ketiga ini, administrasi Negara dipandang sebagai cabang dari ilmu politik yang berkembang pada 1950-1970. Pada tahun 1962 administrasi Negara mulai dilihat secara terpisah dari ilmu politik.

Pada periode antara 1956-1970, muncul paradigma ke empat dalam administrasi publik yang menandai masa di mana administrasi Negara dianggap sebagai ilmu administrasi. Prinsip-prinsip manajemen diperdalam secara ilmiah, dengan penekanan pada bidang seperti perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern. Selama periode ini, terdapat 2 pendekatan administrasi Negara yaitu pengembangan ilmu administrasi murni yang dipengaruhi oleh psikolog sosial, dan ilmu administrasi yang mengkaji mengenai kebijakan publik. Beberapa perkembangan penting pada masa tersebut, misalnya tahun 1960 Keith M. Henderson mengusulkan bahwa teori organisasi harus fokus utama dalam studi administrasi Negara. Hal ini mendorong perkembangan Organizational Development (OD) atau Pengembangan Organisasi sebagai salah satu spesialisasi dalam bidang ilmu administrasi.

Paradigma terakhir yaitu governance melibatkan sektor masyarakat dalam menyediakan pelayanan publik yang sempurna. Seiring dengan perkembangan sejak 1970an, paradigma administrasi Negara sebagai subjek penelitian yang independen. Pengembangan administrasi Negara tidak hanya berfokus pada studi

administrasi Negara sebagai disiplin ilmu murni, tetapi juga mengarah pada pengembangan teori organisasi. Perhatian khusus dalam teori organisasi difokuskan pada pemahaman tentang bagaimana organisasi beroperasi. Perilaku individu, organisasi serta proses pengambilan keputusan didalamnya. Selain itu, berkembang pula cabang-cabang ilmu seperti kebijakan publik, politik ekonomi, analisis kebijakan pemerintah, dan metode pengukuran kebijakan. Aliran-aliran ini meliputi proses administrasi yang mencakup pendekatan empiris, pengambilan keputusan, metode matematika, dan pendekatan sistematis administrasi holistic yang terdiri dari aliran perilaku manusia, analisis birokrasi, sistem sosial, dan integrative.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan paradigma terakhir yaitu governance. Governance dijadikan paradigma dalam penelitian karena melibatkan *stakeholders* yang lebih kompleks termasuk dalam masyarakat.

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan bidang yang baru namun berakar pada pendekatan normatif. Woodrow Wilson, dalam karya "The Study of Administration" pada tahun 1887, dianggap sebagai pelopor dalam bidang ini. Teori manajemen publik terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Awalnya, terdapat pendekatan **Old Public Administrations** yang menjelaskan bahwa manajemen publik melibatkan kajian lintas disiplin mengenai struktur organisasi, dengan menggabungkan elemen-elemen manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, serta aspek-aspek sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik.

Paradigma kedua, yaitu **New Public Management (NPM)**, yang menerapkan sistem manajemen terdesentralisasi dengan menggunakan alat-alat manajemen modern seperti pengendalian, perbandingan, dan manajemen efisien. NPM juga dilihat sebagai langkah privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintah dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari dunia manajemen bisnis untuk meningkatkan kinerja layanan publik dalam birokrasi modern.

Paradigma ketiga adalah Paradigma **New Public Service (NPS)**, yang menekankan pelayanan publik yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi, etika, partisipasi publik, dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma ini berkembang dari pendekatan manajemen publik sebelumnya, NPM, yang lebih berfokus pada efisiensi dan efektivitas berdasarkan prinsip-prinsip manajemen bisnis. Pemerintah dalam paradigma NPS dianggap sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan warga negara dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Paradigma NPS berpendapat bahwa responsivitas birokrasi seharusnya lebih ditujukan kepada warga Negara sebagai pemilik pemerintah, bukan hanya pelanggan. Pemerintah diharapkan memandang masyarakatnya sebagai warga Negara yang berhak mendapat pelayanan karena telah membayar pajak. Dalam konteks Negara yang menganut sistem demokrasi, warga Negara bukan hanya diperlakukan sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan standar tertentu, melainkan sebagai pemilik yang memiliki hak atas pelayanan tersebut. Dalam pandangan NPS, administrator wajib untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lain. Hal ini bertujuan

untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, serta untuk mencegah potensi terjadinya korupsi di dalam birokrasi.

Paradigma terakhir yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah **governance**. Perkembangan dalam administrasi publik dari masa ke masa senantiasa berubah seiring dengan evolusi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini terutama tercermin dalam cara pemerintah menyelenggarakan administrasi publiknya, khususnya ketika tanggung jawab pemerintah semakin bertambah dan lingkup kekuasaannya semakin luas. Dalam konteks ini struktur birokrasi pemerintah pun ikut berubah.

Administrasi publik sangat memerhatikan pentingnya terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan dengan adanya sistem pemerintahan yang demokratis dan dijalankan secara transparan, bersih dan berwibawa. Dalam kerangka pemerintahan yang demokratis, pusat kekuasaan tidak hanya berpusat pada pemerintah semata tetapi juga bergeser untuk lebih diperhatikan oleh rakyat. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik mencakup interaksi oleh rakyat. Penyelenggaraan ini mencakup interaksi antara tiga entitas yaitu rakyat, pengusaha dan pemerintah.

Paradigma tata kelola (governance) adalah kerangka konseptual yang berkaitan dengan cara pengelolaan suatu entitas atau organisasi, baik pada tingkat pemerintahan negara, organisasi swasta, maupun tingkat internasional. Aspek-aspek governance meliputi kelembagaan, proses, dan nilai-nilai. Kelembagaan

merujuk pada struktur organisasi dan institusi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Proses governance mencakup serangkaian langkah atau tahapan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan yang harus transparan, inklusif, dan akuntabel. Nilai-nilai governance meliputi integritas, keadilan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan, yang menjadi landasan untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik. Integrasi yang efektif dari kelembagaan, proses, dan nilai-nilai governance membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dari suatu entitas atau organisasi, menciptakan lingkungan yang stabil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan yang menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan.

Mengacu pada paradigma terakhir penelitian ini membahas aspek kelembagaan pada tata kelola governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis peran *stakeholders* yang tergabung dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.6.4 Stakeholders

Stakeholders adalah entitas atau individu yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat, atau mereka yang memiliki minat atau kemampuan untuk memengaruhi hasil dari suatu kegiatan. Selain itu, *stakeholders* diartikan sekelompok manusia atau komunitas meliputi masyarakat berhubungan dan berkepentingan dengan perusahaan baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Stakeholder dapat didefinisikan dalam individu, kolektif atau organisasi yang berkepentingan, memiliki keterlibatan, atau memperoleh pengaruh (secara positif atau negatif) pada kegiatan / program pembangunan. Pada dasarnya terdapat keterlibatan tiga *stakeholder* yang saling berkaitan satu sama lain meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan dan mengelola kepariwisataan. Masing-masing *stakeholder* mempunyai peran dan fungsi berbeda yang harus dipahami agar pengembangan wisata dapat diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Freeman (1984) *Stakeholders* didefinisikan sebagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan tersebut (Lembaga Administrasi Negara, 2015: 101).

Menurut World Health Organization (WHO), *stakeholders* adalah pihak yang mungkin secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh proses atau hasilnya. Selain itu, menurut Eden dan Ackerman (1988) sebagaimana dikutip dalam Bryson (2002), *stakeholders* adalah individu atau kelompok kecil yang memiliki kekuatan untuk merespon dan bernegosiasi, dan mengubah masa depan strategis organisasi.

Menurut Wibisono (2007), *stakeholder* didefinisikan sebagai suatu pihak atau kelompok yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi atau dipengaruhi berdasarkan kegiatan dan keberadaan perusahaan. Menurut Gonsalves, *stakeholders* terkait dengan pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Hal ini mencakup semua gender, kelompok komunitas dan lainnya

serta lembaga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setiap kelompok memiliki kebutuhan sumberdaya yang berbeda, yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. (A. Hidayah et al., 2019 : 57).

Stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan keberlangsungan organisasi. *Stakeholders* meliputi seluruh pihak yang berkaitan dalam pengelolaan sumber daya. *Stakeholder* mempunyai kepentingan, kebutuhan, dan perspektif yang berbeda dan harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Maryono, 2005) *stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok yaitu

1. *Stakeholders* Primer adalah pihak yang secara langsung terpengaruh oleh suatu rencana, baik itu dampak positif maupun negative, dan memiliki kepentingan langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang akan diambil. (Hidayat et al., 2020). Pada setiap tahapan-tahapan kegiatan, *stakeholders* primer harus dilibatkan penuh karena berperan penting, serta harus dilibatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan atas sebuah permasalahan.

2. *Stakeholders* kunci

Stakeholders kunci adalah pihak yang memiliki otoritas legal dalam pengambilan keputusan atau memiliki pengaruh yang signifikan dan penting terkait dengan keberlangsungan suatu kebijakan. *Stakeholders* kunci mencakup bagian eksekutif, yudikatif dan instansi yang relevan sesuai dengan tingkatnya.

3. *Stakeholders* sekunder atau pendukung

Stakeholders pendukung adalah pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam suatu rencana, tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* pendukung berperan sebagai fasilitator dalam proses pengembangan dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Biasanya, *stakeholders* pendukung termasuk swasta, LSM, dan peneliti.

Pemetaan *stakeholder* dalam konteks triple helix, quadruple helix, dan penta helix merupakan pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi berbagai pihak yang terlibat dalam inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Setiap helix menggambarkan suatu model kolaborasi yang mencakup berbagai *stakeholder* dari sektor yang berbeda.

- Triple Helix

Model Triple Helix melibatkan tiga *stakeholder* utama dalam inovasi dan pembangunan :

a. Pemerintah, berperan dalam regulasi, kebijakan, dan pendanaan.

Pemerintah menetapkan kerangka kerja legal dan kebijakan yang mendukung inovasi serta memberikan insentif bagi penelitian dan pengembangan

b. Akademisi, Universitas dan institusi penelitian yang menyediakan pengetahuan ilmiah dan teknologi melalui penelitian dan pendidikan. Mereka berperan dalam menghasilkan penemuan baru dan mendidik tenaga kerja yang terampil.

- c. Industri (Swasta), perusahaan dan sektor bisnis yang mengimplementasikan inovasi dalam produk dan layanan. Industri bertanggung jawab untuk membawa inovasi ke pasar dan menciptakan nilai ekonomi
- Quadruple Helix, model ini menambahkan elemen keempat dalam model triple helix yaitu :
 - a. Pemerintah, berperan dalam regulasi, kebijakan, dan pendanaan. Pemerintah menetapkan kerangka kerja legal dan kebijakan yang mendukung inovasi serta memberikan insentif bagi penelitian dan pengembangan
 - b. Akademisi, Universitas dan institusi penelitian yang menyediakan pengetahuan ilmiah dan teknologi melalui penelitian dan pendidikan. Mereka berperan dalam menghasilkan penemuan baru dan mendidik tenaga kerja yang terampil.
 - c. Industri (Swasta), perusahaan dan sektor bisnis yang mengimplementasikan inovasi dalam produk dan layanan. Industri bertanggung jawab untuk membawa inovasi ke pasar dan menciptakan nilai ekonomi
 - d. Masyarakat Sipil, termasuk organisasi non pemerintah, komunitas, dan publik umum yang berperan dalam menyuarakan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam co-creation dan validasi inovasi.

- Penta Helix, Model ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya dengan menambahkan media didalamnya. Terdiri dari : Pemerintah, berperan dalam regulasi, kebijakan, dan pendanaan. Pemerintah menetapkan kerangka kerja legal dan kebijakan yang mendukung inovasi serta memberikan insentif bagi penelitian dan pengembangan
 - a. Akademisi, Universitas dan institusi penelitian yang menyediakan pengetahuan ilmiah dan teknologi melalui penelitian dan pendidikan. Mereka berperan dalam menghasilkan penemuan baru dan mendidik tenaga kerja yang terampil.
 - b. Industri (Swasta), perusahaan dan sektor bisnis yang mengimplementasikan inovasi dalam produk dan layanan. Industri bertanggung jawab untuk membawa inovasi ke pasar dan menciptakan nilai ekonomi
 - c. Masyarakat Sipil, termasuk organisasi non pemerintah, komunitas, dan publik umum yang berperan dalam menyuarakan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam co-creation dan validasi inovasi.
 - d. Media atau lingkungan, berperan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang inovasi. Sementara itu, fokus pada lingkungan mencakup isu-isu keberlanjutan dan dampak ekologis dari inovasi.

1.6.5 Stakeholders Mapping

Pemetaan *stakeholders* merupakan tahapan krusial dalam pengelolaan pemerintahan yang demokratis. Sebelum membahas definisi nya penting untuk memahami konsep *stakeholders* itu sendiri. Hingga sekarang, banyak peneliti terdahulu yang memberikan interpretasi yang beragam tentang makna dari istilah *stakeholders* (LAN, 2015). Pemetaan *stakeholders* dapat memberikan kontribusi pada evaluasi lingkungan kegiatan dan dapat membantu dalam menentukan strategi negosiasi yang efektif dalam diskusi terkait kegiatan tersebut. Output dari proses pemetaan *stakeholders* adalah sebagai berikut.

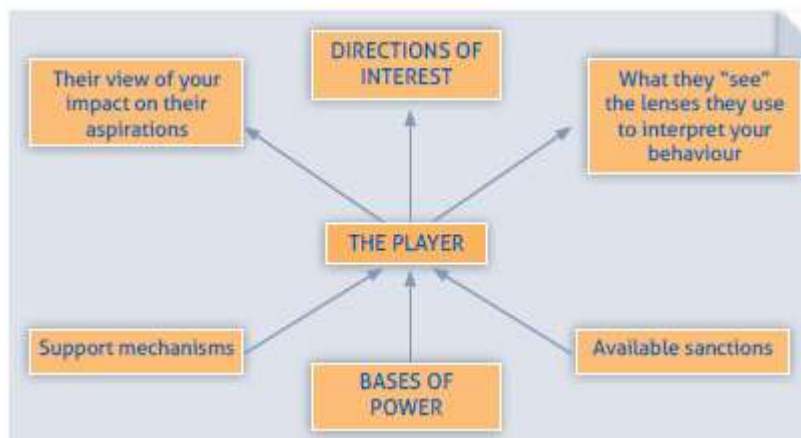
1. Deskripsi tentang pentingnya kepentingan para pihak terlibat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan
2. Pengidentifikasian potensi konflik antara *stakeholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang dapat menghambat kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan.
3. Bantuan dalam memetakan struktur interaksi antara *stakeholders*, sehingga dapat menjadi dasar untuk membentuk kerjasama atau koalisi.
4. Mendukung dalam merumuskan jenis partisipasi yang diharapkan dari berbagai *stakeholders*.

Dalam konteks perumusan kebijakan publik, pemetaan ini penting, sebagaimana dijelaskan Schmeer (1999) bahwa pemetaan ini penting karena memungkinkan para pembuat kebijakan mengidentifikasi aktor-aktor kunci dalam proses perumusan kebijakan, serta menganalisis pengetahuan, kepentingan, posisi, dan sikap mereka terhadap kebijakan tersebut. Kolaborasi antara pembuat kebijakan dan *stakeholders* dapat

meningkatkan dukungan terhadap program atau kebijakan yang diusulkan. Dengan melakukan pemetaan sebelum implementasi kebijakan atau program, pembuat kebijakan dapat mengetahui potensi kesalahpahaman terhadap kebijakan atau program tersebut. Sementara itu Golder (2005), mengungkapkan bahwa pemetaan *stakeholders* dapat membantu mengidentifikasi minat para *stakeholders* terhadap kebijakan atau program, mengantisipasi potensi konflik atau risiko terkait kebijakan, membangun hubungan dengan *stakeholders*, dan mengurangi risiko kegagalan kebijakan.

Terdapat beberapa teknik dalam memetakan *stakeholders*, antara lain :

a. Based of Power-Directions of Interest Diagram

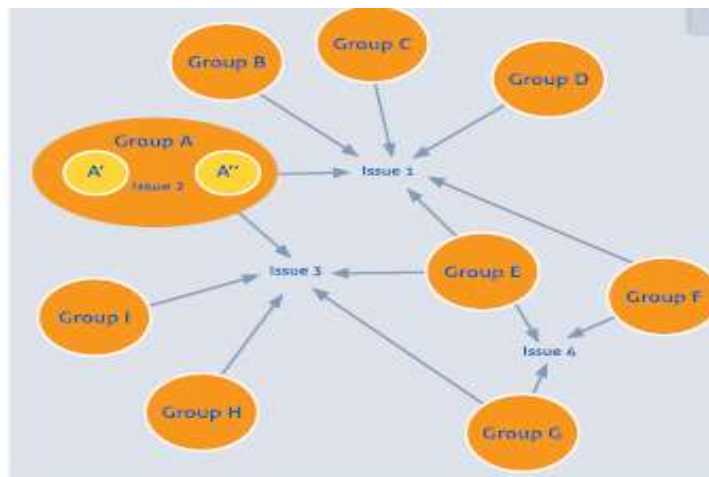


Gambar 1. 1 Based of Power Direction of Interest Diagram

Sumber : <https://scottybreaksitdown.com>

Diagram tersebut bertujuan untuk menganalisis sumber daya atau aspek kekuatan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh *stakeholder*. Kekuatan dapat berasal dari berbagai sumber seperti akses terhadap dana, dukungan publik, control atas sumberdaya tertentu atau kewenangan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, arah kepentingan menunjukkan sejauh mana *stakeholders* tertentu tertarik atau memiliki kepentingan terhadap organisasi atau proyek tertentu. Terdapat dua tujuan umum dalam membangun diagram ini yaitu mengidentifikasi kesamaan sumberdaya atau kekuatan yang dimiliki *stakeholder*, selanjutnya memahami bagaimana *stakeholders* akan menggunakan kekuatan mereka untuk memajukan kepentingan mereka sendiri.

b. *Stakeholder-Issue Interrelationship Diagram*



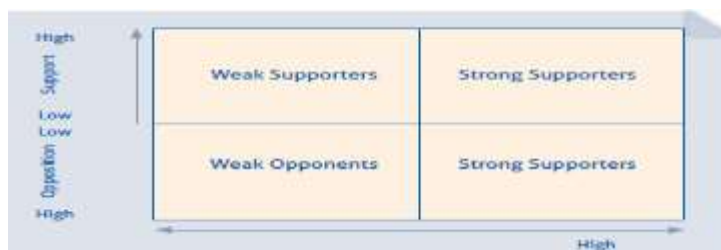
Gambar 1. 2 *Stakeholder-Issue Interrelationship Diagram*

Sumber : <https://scottybreaksitdown.com>

Teknik ini digunakan untuk menganalisis interaksi antara berbagai jenis *stakeholder* terkait dengan berbagai isu kebijakan dan cara *stakeholders* tersebut

saling berhubungan. Tujuannya adalah untuk memahami potensi kerjasama dan konflik antar *stakeholder*. Panah dalam diagram menunjukkan bahwa setiap *stakeholder* memiliki kepentingan pada isu tertentu, meskipun kepentingan tersebut mungkin berbeda beda antar *stakeholders*. Selain itu, labeling juga dapat menunjukkan dengan jelas apakah kepentingan tersebut menyebabkan konflik atau tidak.

c. Problem-Frame Stakeholder Map



Gambar 1. 3 Problem-Frame Stakeholder Map

Sumber : <https://scottybreaksitdown.com>

Teknik analisis ini berguna untuk memahami permasalahan secara mendalam sehingga dapat membantu dalam pembentukan koalisi yang kuat. Hal ini diperlukan agar dapat merumuskan cara-cara yang efektif untuk mendefinisikan permasalahan sehingga dapat menggerakkan tindakan oleh koalisi *stakeholders* untuk melindungi kepentingan mereka selama implementasi kebijakan. Perumusan atau definisi permasalahan menjadi sangat penting karena hal tersebut memungkinkan merumuskan solusi yang sesuai dengan harapan *stakeholders*, dan membantu membangun dukungan *stakeholders* selama proses implementasi.

d. Ethical Analysis Grid

Kategori Stakeholder	Kepentingan	Sumber daya	Channel	Kemungkinan partisipasi	Tingkat pengaruh	Implikasi	Action
Mereka yang (potensial) mendukung							
Mereka yang (potensial) menolak							

Gambar 1. 4 Ethical Analysis Grid

Sumber : <https://scottybreaksitdown.com>

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh pemahaman yang mendalam terhadap *stakeholders* yang mendukung dan yang menentang.

Kedua kelompok ini perlu dipahami dengan cermat dalam hal :

- a. Kepentingan nya : Aspek yang *stakeholders* perjuangkan.
- b. Sumberdaya : Apa saja yang dimiliki untuk kepentingannya
- c. Saluran Komunikasi : Cara *stakeholders* berinteraksi dan berkomunikasi dalam mengejar kepentingan.
- d. Tingkat partisipasi : Tingkat keikutsertaan *stakeholders*
- e. Tingkat pengaruh : Sejauh mana mereka dapat memengaruhi melalui kendali sumber daya atau partisipasi mereka..
- f. Implikasi dari pengaruh mereka : Dampak dari pengaruh *stakeholders* terhadap strategi implementasi kebijakan.
- g. Langkah-Langkah yang perlu diambil : Tindakan yang harus diambil untuk merespons atau mengantisipasi *stakeholders* dengan pengaruh yang mereka miliki.

Secara umum, *stakeholder* dapat dikelompokkan berdasarkan posisi, kekuatan dan pengaruhnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maryono et al. (2005), terdapat 3 kelompok *stakeholders* yaitu :

- a. *Stakeholders* primer : Merupakan pihak yang secara langsung terkena dampak, baik positif maupun negative, dari suatu kegiatan dan memiliki kepentingan langsung terhadapnya. Mereka yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam hal tersebut disebut sebagai *stakeholder* primer dan harusnya terlibat penuh dalam seluruh tahapan kegiatan.
- b. *Stakeholder* kunci : Merupakan pihak yang memiliki kewenangan legal dalam proses pengambilan keputusan.
- c. *Stakeholder* pendukung : Merupakan pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana, tetapi peduli terhadap pengembangannya. *Stakeholder* pendukung berperan sebagai fasilitator dalam proses pengembangannya dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. *Stakeholder* pendukung meliputi investor, swasta, LSM dan peneliti.

1.6.6 Peran *Stakeholders*

Stakeholders atau pihak-pihak yang terlibat adalah entitas yang bisa memberikan pengaruh pada keputusan yang diambil atau merasakan dampak dari keputusan tersebut (Oktavia & Saharuddin, 2013). *Stakeholders* baik individu ataupun kelompok masyarakat, memiliki legitimasi, kekuasaan dan kepentingan terhadap kesuksesan perusahaan atau pemerintahan. Mereka memainkan peran

yang signifikan dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan operasional entitas tersebut.

Bryson (2004) menyarankan penggunaan matriks pengaruh dan kekuatan untuk mengidentifikasi peran masing-masing *stakeholders*. Matrik ini membagi *stakeholder* menjadi beberapa kategori yaitu :

1. *Context setter* : memiliki pengaruh besar, namun memiliki sedikit kepentingan. Sehingga, menimbulkan risiko yang signifikan dan perlu dipantau dengan seksama
2. *Key player* : merupakan *stakeholder* aktif karena memiliki kepentingan dan pengaruh besar terhadap pengembangan program
3. *Subject* : memiliki kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah. Meskipun mendukung kegiatan, dampaknya terhadap hasil mungkin terbatas. Namun, mereka dapat memiliki pengaruh melalui aliansi dan *stakeholder* lain.
4. *Crowd* : adalah *stakeholders* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Hal ini menjadi pertimbangan untuk melibatkannya dalam pengambilan keputusan. Kepentingan dan pengaruh mereka dapat berubah seiring waktu, sehingga perlu dipertimbangkan secara berkala.

1.6.7 Faktor Pendorong dan Penghambat *stakeholders* dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan

Analisis peran *stakeholders* dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Menurut penelitian Destiana dkk (2020), terdapat empat elemen yang terkait dengan faktor pendukung dan penghambat dalam peran *stakeholders* :

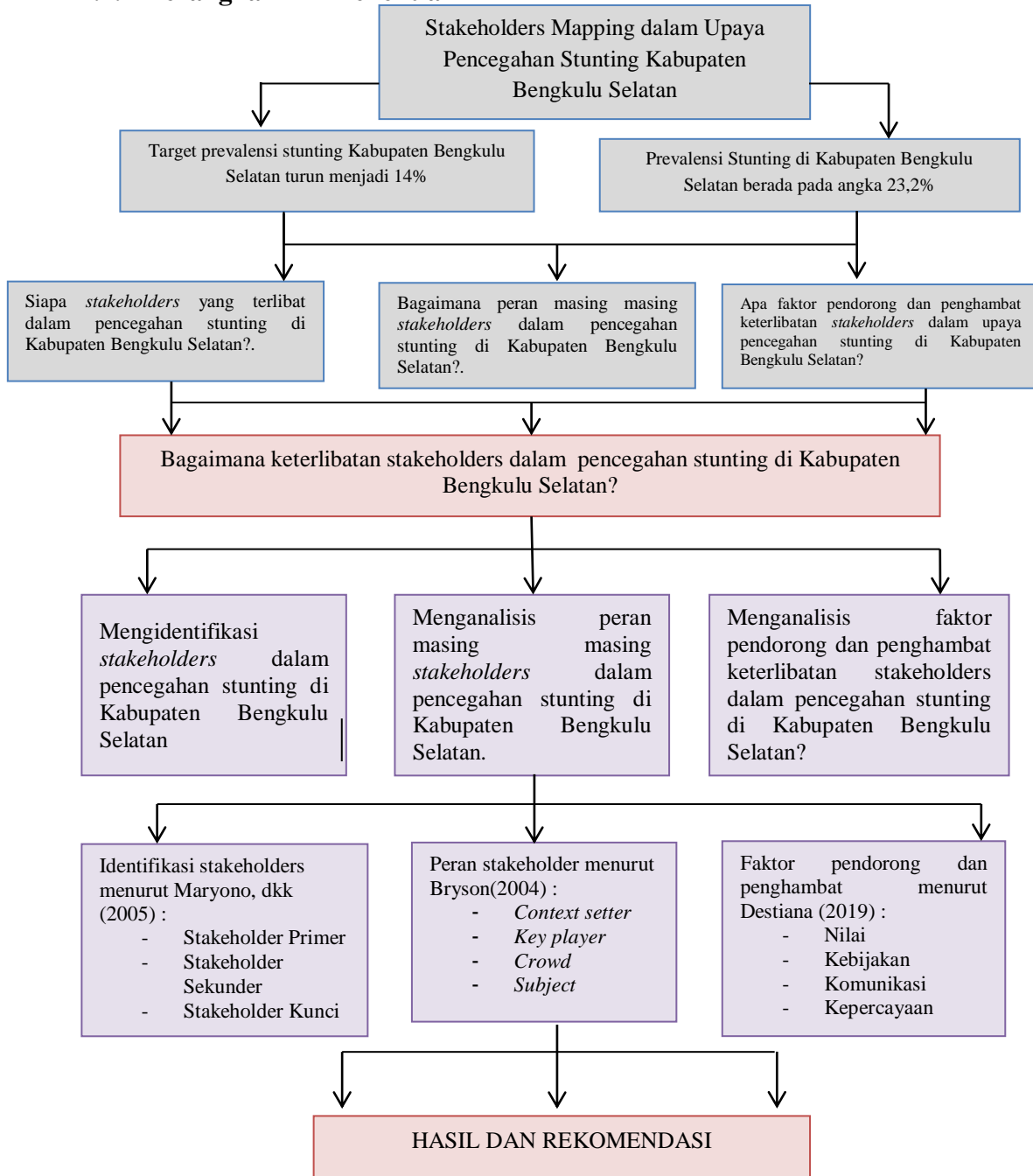
- a. Nilai : merujuk pada harga, kedalaman mutu dan jumlah isi dari sesuatu. Nilai juga dapat diinterpretasikan sebagai prinsip atau standar yang menentukan kualitas yang dianggap penting. Schwartz, seperti yang disebutkan dalam penelitian oleh Dahriyanto (2018), menggambarkan nilai sebagai tujuan individu dengan tingkat kepentingan yang bervariasi, serta menjadi prinsip yang membimbing perilaku dalam konteks sosial. Analisis peran *stakeholders* memiliki beberapa nilai seperti: nilai individual, organisasi, legalitas, dan profesionalitas. Nilai individual dilihat dari peran kepemimpinan sebagai penggerak dalam penanggulangan banjir. Kemudian nilai organisasi dilihat dari landasan masing-masing institusi. Terakhir yaitu nilai profesionalitas dilihat dari kemampuan dan komitmen individu yang melaksanakan kebijakan terkait penanggulangan banjir.
- b. Komunikasi: Hubungan antar *stakeholders* dapat berjalan secara efektif karena didukung oleh komunikasi yang baik (Destiana, 2020). Harold Lasswell menyebutkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yaitu: pengirim pesan, pesan, media, penerima pesan, dan efek atau umpan balik. Sehingga berdasarkan unsur tersebut komunikasi juga diartikan sebagai proses penyampaian pesan oleh pengirim pesan melalui media tertentu

kepada penerima pesan. Komunikasi yang efektif di mana *stakeholders* secara aktif terlibat, dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dan mengatasi konflik, serta dapat membentuk hubungan yang baik.

- c. Kepercayaan: Menurut Colquitt, LePine dan Wesson. Kepercayaan adalah dorongan untuk mengandalkan otoritas tertentu berdasarkan harapan positif terhadap tindakan dan perhatiannya.

1.7. Kerangka Pikir Penelitian

1.7.1 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Diolah Peneliti, 2024

1.8.Operasionalisasi Konsep

Stakeholders mapping atau pemetaan *stakeholder*, merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan posisi, kewenangan dan kepentingan *stakeholders* yang terlibat dalam suatu persoalan tertentu. Penelitian ini memetakan *stakeholders* yang memiliki kepentingan dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemetaan *stakeholder* ini akan mengidentifikasi *stakeholders* primer, *stakeholders* sekunder atau pendukung, dan *stakeholders* kunci. Untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat, penelitian ini menggunakan Power Versus Interest Grid *Stakeholders Map* sebagai instrumen dalam melakukan analisis *stakeholders mapping*.

Peran *stakeholders*, merupakan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suatu pihak yang memiliki kedudukan tertentu. Penelitian ini menganalisis peran *stakeholder* untuk mengetahui efektivitas peran dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun peran yang dimaksud meliputi

1. *Context setter* : merupakan *stakeholder* memiliki pengaruh besar, namun memiliki sedikit kepentingan. Sehingga, menimbulkan risiko yang signifikan dan perlu dipantau dengan seksama
2. *Key player* : merupakan *stakeholder* aktif karena memiliki kepentingan dan pengaruh besar terhadap pengembangan program
3. *Subject* : merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah. Meskipun mendukung kegiatan,

dampaknya terhadap hasil mungkin terbatas. Namun, mereka dapat memiliki pengaruh melalui aliansi dan *stakeholder* lain.

4. *Crowd* : adalah *stakeholders* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang di inginkan. Hal ini menjadi pertimbangan untuk melibatkannya dalam pengambilan keputusan. Kepentingan dan pengaruh mereka dapat berubah seiring waktu, sehingga perlu dipertimbangkan secara berkala.

Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep

No	Fenomena Penelitian	Sub Fenomena	Gejala yang diamati
1	Pemetaan <i>Stakeholders</i> dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan	Identifikasi <i>stakeholders</i> 1. <i>Stakeholders</i> Primer 2. <i>Stakeholders</i> Sekunder 3. <i>Stakeholders</i> Kunci	1. Kepentingan 2. Kewenangan dalam proses pengambilan keputusan 3. Dampak bagi <i>stakeholders</i>
2.	Peran <i>Stakeholders</i> dalam pencegahan stunting Kabupaten Bengkulu Selatan	1) <i>Key players</i> : memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi. 2) <i>Context setters</i> : memiliki kepentingan rendah, , tingkat pengaruh tinggi 3) <i>Subject</i> : tingkat kepentingan tinggi, tingkat pengaruh rendah. 4) <i>Crowd</i> : tingkat kepentingan dan pengaruh rendah	1. Harapan dan aspirasi <i>stakeholders</i> 2. Manfaat bagi <i>stakeholders</i> 3. Upaya <i>Stakeholders</i> 4. Pengaruh <i>Stakeholders</i>
3.	Faktor Pendorong dan	- Nilai	a. Nilai yang dianut b. Pengaruh nilai

Penghambat	- Komunikasi	a. Komunikasi antar <i>stakeholders</i> b. Kendala Komunikasi
	- Kepercayaan	a. Pengaruh Kepercayaan
	- Kebijakan	Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini melakukan pendekatan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diukur secara matematis atau statistic, tetapi lebih mengandalkan penjelasan dan deskripsi melalui penguraian naratif fenomena yang diamati di lapangan. Straus dan Corbin dalam (Murdiyanto, 2020) menjelaskan penelitian kualitatif dapat dimanfaatkan dalam penelitian sosial humaniora seperti kehidupan masyarakat, tingkah laku dan sejarah, keorganisasian, sosial dan kemasyarakatan, atau hubungan kekerabatan.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang sifatnya deskriptif dan lebih menekankan pada kekuatan analisis (Saputra, 2022). Proses dan makna mendapatkan penekanan yang lebih besar dalam penelitian ini. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memastikan fokus penelitian sesuai dengan

realitas di lapangan. Metode kualitatif lebih menitikberatkan pada pengamatan fenomena dan menggali makna dibalik fenomena tersebut. Analisis dalam penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.

Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang diwujudkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini akan menentukan metode pengumpulan data dan cara analisis yang akan digunakan. Metode kualitatif bersifat dinamis, yang berarti selalu terbuka terhadap kemungkinan adanya perubahan, penambahan atau penggantian selama proses analisis.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Menetapkan situs penelitian merupakan tahapan krusial dalam penelitian kualitatif. (Wiratna Sujarwene 2014:73). Penetapan situs penelitian akan membantu menetapkan objek dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian dipilih untuk memperoleh data primer, oleh karena itu peneliti memilih Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai situs penelitian. Alasan memilih Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai lokus dari penelitian ini adalah karena berdasarkan judul dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelembagaan dalam hal pemetaan *stakeholder* pada upaya pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pada sebuah riset, penentuan subjek riset memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan dan memastikan kualitas isi riset. Hal ini dikarenakan subjek riset merupakan sumber utama dari riset yaitu pihak yang memiliki informasi

mengenai variabel-variabel yang diteliti (Saputra, 2022). Jika data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti tidak sesuai dengan kondisi subjek, maka validitas riset tersebut menjadi rendah dan kualitasnya tidak dapat diandalkan. Dalam riset sosial, terutama dibidang pendidikan dan kesehatan, subjek riset yang sering digunakan adalah siswa, guru, dan masyarakat umum. Sementara itu, dalam riset psikologi yang bersifat eksperimental, subjek riset dapat berupa manusia maupun hewan.

Peneliti membutuhkan sejumlah informan sehingga melibatkan semua pihak yang berperan dalam kolaborasi pencegahan stunting Kabupaten Bengkulu Selatan dengan informan utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, serta menggunakan teknik *snowball sampling* untuk memperoleh informan lain . Teknik *snowball sampling* melibatkan pengambilan sampel dengan bantuan informan kunci, yang kemudian akan mengembangkan sampel berdasarkan arahan yang diberikan oleh informan utama. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif atau naturalistic, yang mengarah pada pengumpulan data yang terjadi secara alamiah melalui observasi. Pemilihan desain penelitian ini disebabkan oleh kegiatan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan. Subjek penelitian atau informan merujuk kepada individu atau kelompok yang akan memberikan keterangan terkait fakta atau pandangan pribadi. Penentuan subjek penelitian ini harus relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian ini melibatkan subjek yang terkait dengan isu kolaborasi sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, desain penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan data berbentuk

deskriptif dalam bentuk naratif atau lisan, tanpa menggunakan angka atau statistic.

Adapun subjek dalam penelitian ini antara lain :

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Direktur Utama Akademi Kebidanan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Pimpinan Wahana Visi Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Pimpinan Radar Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Kader Posyandu Bengkulu Selatan

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Metode merupakan cara atau prosedur yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan data adalah proses atau cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian memiliki peran yang sangat penting. Menurut (Saputra, 2022) dalam penelitian yang dilakukan oleh Sandu Siyoto (2005) menekankan bahwa monitoring pengumpulan data penelitian penting untuk memastikan tingkat validitas dan reliabilitas data.

Pentingnya data yang dipergunakan dalam penelitian menjadikan sumber sumber yang digunakan dalam pengumpulan data haruslah tepat sasaran. Dokumen yang abash serta informan yang ahli adalah kunci dari kevalidan data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian.

Peneliti memanfaatkan data berjenis kualitatif karena data tersebut dapat disusun secara kategoris berdasarkan atribut dan sifat dari fenomena yang diteliti dan data ini didapatkan dari hasil wawancara secara mendalam terkait narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, observasi langsung ke lapangan, serta dokumentasi. Wiratna Sujarweni (2014: 89-94) mengungkapkan bahwa data di dalam penelitian digolongkan menjadi data kualitatif

Pada tahapan ini peneliti tertarik pada menggunakan dua sumber data yaitu primer yang didapatkan melalui wawancara dengan *stakeholders* yang terkait dalam proses kolaborasi . Sedangkan untuk data kedua menggunakan data sekunder yang didapatkan dari jurnal ilmiah, serta dokumen yang dapat diakses pada Pemerintah Daerah dan OPD Kabupaten Bengkulu Selatan.

- a. Data Primer, merujuk pada sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti. Biasanya, jenis data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang dapat dipercaya.
- b. Data Sekunder, adalah jenis data yang diperoleh tidak langsung, seringkali melalui pihak ketiga atau melalui analisis dokumen yang ada. Data sekunder dikumpulkan oleh peneliti dapat berupa literature, artikel, jurnal, serta dokumen-dokumen resmi yang tersedia dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak yang merupakan sumber data primer, pengamatan langsung dan dokumentasi lapangan. Teknik-teknik ini digunakan

untuk memudahkan peneliti mengumpulkan data-data untuk kemudian diolah.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara : Wawancara adalah interaksi antara peneliti atau informan atau narasumber, di mana peneliti mengajukan pertanyaan dan informan memberikan jawaban. Wawancara dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung.
2. Teknik Pengamatan/Observasi : Observasi merupakan kegiatan sistematis untuk mengamati langsung sejumlah gejala yang menjadi objek penelitian. Jika dilakukan dengan sesuai tujuan penelitian, rencana penelitian, pencatatan yang sistematis untuk mengontrol reliabilitas dan validitasnya, data yang dikumpulkan melalui metode ini dianggap valid.
3. Teknik Dokumentasi : Dokumentasi merujuk pada catatan, gambar, rekaman kejadian. Dengan mengkaji dokumen, data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dapat diperkuat dengan data yang terdapat pada dokumen yang dianalisis.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan langkah yang penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisir dan memahami data secara sistematis guna menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan meninjau semua data yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dokumen, gambar dan lain sebagainya.

Catatan tersebut dapat bersifat deskriptif yang menjabarkan peristiwa dengan detail, efektif yang menggambarkan pemikiran dan refleksi peneliti terhadap fenomena yang diamati. Setelah data dipelajari, langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data dengan membuat abstraksi yang mencakup inti dari data tersebut. Abstraksi ini bertujuan untuk menjaga esensi data. Selanjutnya data disusun kedalam unit-unit dan kategori, langkah terakhir adalah menafsirkan atau memberikan makna terhadap data tersebut (Murdiyanto, 2020).

Proses analisis dari suatu interpretasi data dalam penelitian kualitatif memerlukan tingkat kreativitas yang tinggi. Namun, dalam proses tersebut, metode yang diterapkan haruslah eksplisit dan sistematis. Sehingga, peneliti dapat melakukan analisis dan intepertasi data dengan pendekatan terkstual yang terstruktur. (Pedoman Penulisa Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2020).

Terdapat berbagai teknik analisis kualitatif yang dapat digunakan dalam penelitian. Salah satunya adalah Teknik Model Spradley yang dikemukakan oleh James P.Spradley. Model ini terdiri dari empat tahapan yaitu Domain, Analisis Taksonomi, Analisis Komponensial, dan Analisis Tema Kultural. Tahapan pertama yaitu Analisis Domain, melibatkan pemahaman umum tentang objek penelitian atau isu sosial yang diangkat. Tahapan kedua Analisis Taksonomi, mencakup pengelompokan data berdasarkan domain-domain yang telah ditemukan. Tahapan Ketiga, Analisis Komponensial, bertujuan untuk mengetahui ciri spesifik dari setiap unsur yang menyusun domain data tersebut. Terakhir, tahapan keempat

Analisis Tema Kultural, melibatkan penarikan hubungan antardomain data untuk membuat kesimpulan dari seluruh data penelitian.

Selain model Spradley, ada pula teknik analisis data kualitatif yang umum digunakan dalam penelitian. Salah satunya adalah Analisis Konten, yang melibatkan pemahaman menyeluruh terhadap tema yang ada dalam kualitatif. Metode ini dapat digunakan untuk berbagai disiplin ilmu sosial, seperti penelitian sosio-antropologis, penelitian komunikasi umum, dan ilmu politik. Teknik analisis naratif juga sering digunakan, dimana peneliti berupaya menyampaikan ide atau cerita dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya Analisis Wacana yang digunakan untuk menganalisis interaksi antar personal dalam konteks tertentu. Metode ini bertujuan untuk memahami wacana atau komunikasi antar personal.

1.9.7 Kualitas Data dan Validitas Data

Validitas data merujuk pada sejauh mana data yang tercatat oleh peneliti mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam konteks penelitian, validitas mengukur sejauh mana alat pengukuran yang digunakan sesuai dengan inti dari penelitian itu sendiri (Silalahi, 2015).

Data dikatakan valid jika hasil yang dilaporkan oleh peneliti tidak berbeda jauh dengan fakta yang terjadi di lapangan. Validitas internal digunakan untuk menilai sejauh mana desain penelitian dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

Triangulasi data adalah langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data berdasarkan sumbernya. Tahap ini melibatkan perbandingan dan pengecekan berulang dari berbagai sumber untuk memastikan

keakuratan informasi yang diperoleh. Trianggulasi sumber mengacu pada upaya memperoleh data dari berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama. Dari kegiatan trianggulasi data ini dapat dinilai apakah jawaban tersebut mendapat respon yang sama dari sumber yang berbeda. Kesamaan yang ada membuktikan keabsahan jawaban dan dapat digunakan untuk penelitian yang baik.